

Abstrak

Untuk mewujudkan pelaksanaan pengelolaan APBN yang optimal sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pemerintahan pada instansi/satuan kerja vertikal kementerian/lembaga, maka bendahara pengeluaran untuk menatausahakan serta mempertanggungjawabkan setiap uang yang dikelolanya. Penelitian yang berjudul “Tinjauan Atas Penatausahaan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran pada KPPN Pematangsiantar” ini memiliki rumusan masalah terkait bagaimana proses penatausahaan LPJ Bendahara Pengeluaran, serta kesesuaian dengan peraturan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau proses penatausahaan LPJ Bendahara Pengeluaran berupa pembukuan bendahara pengeluaran terhadap transaksi pengeluaran dan penerimaan kas yang dikelolanya serta penyusunan dan penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran pada KPPN Pematangsiantar.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu studi pustaka dan studi lapangan berupa observasi dan wawancara. Adapun sumber data yang digunakan adalah berupa data primer berupa LPJ dan dokumen pendukung lainnya serta dokumen sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan jurnal ilmiah yang relevan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam melaksanakan pembukuan dan penyusunan LPJ Bendahara, KPPN Pematangsiantar telah menggunakan aplikasi SAKTI. Pembukuan bendahara pengeluaran terdiri dari Buku Kas Umum, Buku Pembantu, serta Buku Pengawasan Anggaran. Berdasarkan pembukuan tersebut, maka bendahara menyusun LPJ. Kemudian LPJ akan disampaikan ke KPPN paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya dengan dilampiri dokumen pendukung lainnya.

Kata Kunci: penatausahaan, LPJ, Bendahara Pengeluaran, SAKTI

Abstract

To actualize the optimal implementation of APBN management as the basis for implementing government activities in ministries/institutions vertical work units, the expenditure treasurer is to administer and account for every money he manages. The research, entitled "Overview of the Administration of the Expenditure Treasurer Accountability Report at KPPN Pematangsiantar" has a problem formulation related to the administration process of the Expenditure Treasurer LPJ, as well as compliance with applicable regulations. This study aims to review the administrative process of the Expenditure Treasurer LPJ in the form of the expenditure treasurer's bookkeeping of the cash receipts and expenditure transactions it manages as well as the preparation and submission of the Expenditure Treasurer LPJ at KPPN Pematangsiantar.

The method used in this research is a qualitative method, which are library research and field studies in the form of observations and interviews. The data sources used are primary data in the form of LPJ and other supporting documents as well as secondary documents in the form of laws and regulations and relevant scientific journals.

The results of the study concluded that in carrying out the bookkeeping and preparation of the LPJ Treasurer, KPPN Pematangsiantar had used the SAKTI. The bookkeeping of the expenditure treasurer consists of the General Cash Book, the Subsidiary Book, and the Budget Control Book. Based on these books, the treasurer prepares the LPJ. Then the LPJ will be submitted to KPPN no later than the 10th of the following month accompanied by other supporting documents.

Keywords: *administration, LPJ, Expenditure Treasurer, SAKTI*